

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pendidikan menjadi bagian penentu kemajuan dan ketahanan suatu bangsa di masa depan. Pendidikan merupakan salah satu alternatif strategis dalam mencerdaskan bangsa dan modal utama pembangunan suatu bangsa. Pendidikan dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat mengakibatkan kemajuan, kesejahteraan dan pembangunan bangsa tercapai, jika sumber daya manusianya berkualitas. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas tergantung pada mutu pendidikan.

Kesadaran pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan kurikulum, perbaikan kurikulum, sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Depdiknas, 2001: 2).

Masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Berikut ini

beberapa masalah yang menyebabkan peningkatan mutu pendidikan belum berjalan secara maksimal :

1. Akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih sangat rendah.
2. Penggunaan sumber daya yang tidak optimal dan rendahnya anggaran pendidikan merupakan kendala yang besar.
3. Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan rendah.
4. Sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Pemerintah dengan kebijakannya akan selalu bertanggung jawab dalam upaya peningkatan dan pengembangan pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan belum mencapai mutu atau kualitas yang kompetitif. Kebijakan seperti halnya otonomi daerah telah menghasilkan pergeseran dalam mengelola persoalan-persoalan pendidikan. Pergeseran yang dimaksud adalah bahwa sistem manajemen pendidikan yang semula sentralistik menjadi desentralistik.

Desentralisasi atau otonomi pengelolaan sekolah akan memberi keleluasaan dalam mengelola sumber dayanya sesuai prioritas kebutuhan sekolah. Dengan otonomi pengelolaan, sebagian besar keputusan pendidikan harus dibuat di tingkat sekolah. Otonomi pengelolaan ini mengikutsertakan peran masyarakat untuk ikut serta mempengaruhi keberhasilan sekolah. Esensi hubungan sekolah-masyarakat adalah keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finansial (Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003).

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi yaitu : 1) masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan, 2) lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial masyarakat baik langsung maupun tidak langsung mempunyai peranan dan fungsi edukatif, 3) dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun tidak dirancang dan dimanfaatkan.

Simon (Aan Komariah dan Cipi Triatna, 2008: 70) mendefinisikan desentralisasi sebagai suatu organisasi administratif adalah sentralisasi yang luas apabila keputusan yang dibuat pada level organisasi yang tinggi, desentralisasi yang luas apabila keputusan didelegasikan dari *top management* kepada level yang rendah dari wewenang eksekutif. Berdasarkan pengertian tersebut, desentralisasi merupakan wujud kepercayaan pusat kepada daerah untuk melaksanakan pembangunannya berdasarkan prakarsa sendiri. Implikasinya adalah daerah harus bertanggung jawab secara profesional untuk menampilkan kinerja terbaiknya.

Otonomi daerah sebagai wahana untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di masyarakat, lancar dan tidaknya realisasi pelaksanaan otonomi daerah tersebut, sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat itu sendiri. Kemampuan yang dibutuhkan antara lain adalah kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola dinamika masyarakat, kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya alam secara tepat, memotifasi lembaga-lembaga

pendukung pembangunan, serta keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan untuk kemajuan daerah.

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin di atasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/ industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan lewat suatu wadah yaitu Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan.

Komite sekolah dibentuk sebagai pengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Penggantian nama BP3 menjadi komite sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah ini telah mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Komite sekolah adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan layanan pendidikan,

bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan sekolah.

Komite sekolah mempunyai peran yang sangat strategis, karena komite sekolah berperan sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, badan pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelesaian pendidikan di satuan pendidikan, badan pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan serta mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di lingkungan satuan pendidikan (SK Mendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah).

Keberhasilan suatu sekolah tidak hanya dilihat dari kegiatan belajar mengajar saja yang merupakan keterpaduan dari komponen pendidikan, seperti: kurikulum, tenaga, sarana dan prasarana. Tetapi masyarakat juga berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah.

Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001: 199) berpendapat bahwa sumbangan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tidak hanya berbentuk materi tetapi tenaga dan pemikiran. Sejalan dengan pendapat tersebut, pada

era otonomi daerah, sekolah lebih bergerak secara mandiri dalam meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan penelitian awal di SMA N 1 Temon, komite sekolah belum berperan secara aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala antara pihak sekolah dengan komite sekolah, di antaranya:

1. Sulit untuk mengadakan pertemuan yang rutin dengan komite sekolah, dikarenakan komite sekolah mempunyai kesibukan tersendiri.
2. Terbentuknya komite sekolah pada setiap satuan pendidikan, mengakibatkan pengurus dan anggota komite sekolah menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk mengatur tata laksana pengelolaan komite sekolah, termasuk di dalamnya mekanisme pembentukan komite sekolah periode berikutnya. Dari hasil penelitian awal yang dilakukan di SMA N 1 Temon, komite sekolah belum menyusun AD/ART.
3. Komite sekolah pada prinsipnya masih sebatas melaksanakan rapat maupun pertemuan kepala sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat dan guru tentang perencanaan dalam rangka pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
4. Adanya pendapat dari beberapa orang tua siswa/ masyarakat yang beranggapan bahwa fungsi komite sekolah tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh BP3 yang tidak berhasil memobilisasi partisipasi dan tanggung jawab masyarakat.

5. Komite sekolah hanya sebagai syarat pelengkap dalam suatu satuan pendidikan.
6. Pembentukan komite sekolah yang dilakukan dengan cara menunjuk secara langsung tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan komite sekolah yang meliputi demokratis, transparansi dan akuntabilitas.

Komite Sekolah di SMA Negeri 1 Temon di atas kurang berfungsi sesuai dengan perannya yang telah ditentukan dan hanya berfungsi saat adanya bantuan dari pemerintah dan input (dana), juga adanya indikasi komite sekolah kurang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu penyelenggaraan pendidikan sekolah perlu memberdayakan masyarakat dengan mengajak bekerjasama dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga potensi itu dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Kebersamaan merupakan potensi yang sangat penting untuk membangun masyarakat dalam menciptakan demokrasi pendidikan.

Pemberdayaan komite sekolah memerlukan proses bertahap dari waktu ke waktu, mulai pada tingkat menyadarkan perlunya fungsi komite sekolah baik kepada masyarakat maupun penyelenggara pendidikan. Tingkat berikutnya menyebarluaskan konsep pelibatan publik dalam komite sekolah kepada masyarakat dan penyelenggaran pendidikan. Berikutnya adalah penyelenggara pendidikan melakukan konsultasi ke masyarakat secara sinergis dalam bentuk saran dengan penyelenggaraan pendidikan memutuskan kebijakan. Pada tingkat tertinggi adalah tercapainya rasa saling memiliki

bahwa komite sekolah sebagai wadah pemecahan masalah bersama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pada tingkat tertinggi ini masyarakat ikut memutuskan dan memecahkan masalah tanpa ada peran oposisi. Pada kondisi ini perlunya kematangan internal penyelenggaraan pendidikan, perubahan tatanan dalam pola berpikirnya, mengedepankan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, di samping prinsip lainnya yang harus dilaksanakan secara komprehensif.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka penelitian mengenai peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA N 1 Temon, dilakukan karena kurang optimalnya partisipasi komite sekolah. Sehingga penelitian yang telah dilaksanakan di SMA N 1 Temon dapat memberikan informasi mengenai peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Partisipasi komite sekolah dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di SMA N 1 Temon kurang optimal.
2. Anggapan dari masyarakat bahwa peran komite sekolah tidak jauh berbeda dengan peran BP3 yang tidak berhasil memobilisasi partisipasi dan tanggung jawab masyarakat.
3. Pembentukan komite sekolah tidak memperhatikan prinsip demokratis, transparansi dan akuntabilitas.

4. Koordinasi komite sekolah yang tidak optimal, dikarenakan komite sekolah sibuk dengan profesi atau pekerjaannya.
5. Ketidakpedulian masyarakat terhadap program-program sekolah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, jelaslah kompleks permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini tidak membahas semua permasalahan di atas, sehingga diperlukan adanya batasan masalah. Penelitian ini akan difokuskan pada peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA N 1 Temon.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam ikut serta menyusun rencana program sekolah, melaksanakan program dan mengelola sumber daya sekolah?
2. Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan pendukung dalam ikut serta penyelenggaraan pendidikan di sekolah?
3. Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (mewujudkan transparansi dan akuntabilitas) penyelenggaraan dalam pendidikan di sekolah?
4. Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan mediator antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan dewan pendidikan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam ikut serta menyusun rencana program sekolah, melaksanakan program dan mengelola sumber daya sekolah.
2. Untuk mengetahui peranan komite sekolah sebagai badan pendukung dalam ikut serta penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
3. Untuk mengetahui peranan komite sekolah sebagai badan pengontrol (mewujudkan transparansi dan akuntabilitas) penyelenggaraan dalam pendidikan di sekolah
4. Untuk mengetahui peranan komite sekolah sebagai badan mediator antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan dewan pendidikan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dianalisis, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Komite Sekolah

Sebagai bahan informasi seberapa besar keterlaksanaan perannya dalam peningkatan mutu pendidikan, sehingga akan menjadi masukan dalam peningkatan pelaksanaan peran dan fungsinya.

2. Bagi Sekolah

Sebagai informasi untuk sekolah mengenai keadaan komite sekolah dilihat dari keterlaksanaan peran dalam peningkatan mutu pendidikan sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengelolaan dan perumusan kebijakan pendidikan di SMA N 1 Temon.

3. Bagi Jurusan Administrasi Pendidikan

Sebagai informasi dan menambah wawasan pengetahuan Jurusan Administrasi Pendidikan khususnya mengenai peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.